

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi telah marak dan menjamur di berbagai sudut Kota. Yang menjadi sorotan adalah Surabaya, dengan istilah lain yaitu “Surabaya Surga Para Buaya” sebagai kota prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yang mengalahkan Batam bahkan Thailand (*Suara Surabaya, Kamis 24 November 2008 dalam Kermil Tergusur*). Salah satu lokalisasinya yang berada di RW IV Bangunsari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan. Lokalisasi yang berdiri pada awal tahun 1970-an dengan jumlah PSK sebanyak 4 ribuan berkurang tajam sejak tahun 1990-an hingga tahun 2012 tersisa 200-an PSK. Dan pada tanggal 21 Desember 2012 silam bersama Walikota Surabaya Ir. Tri Risma Harini, MT bersama Muspida Plus, MUI Jawa Timur, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, RW dan RT serta warga mendeklarasikan bahwa Bangunsari bebas dari prostitusi (Hakim, 2012).

Di dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang melarang pelacuran. Ketidaktegasan pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, 297, dan 506 yang hanya menegaskan pelarangan dan ancaman hukuman kepada mucikari, dan para calo yang menyediakan tempat, bukan pelarangan kepada pelacur. Mereka dengan terpaksa menjadi pelacur karena telah masuk jaringan pelacuran. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari dunia hitam itu. Padahal, pada tingkat tertentu, mereka menyadari bahwa jenis pekerjaannya bertentangan dengan ajaran agama dan suara hati nuraninya. Karena itulah, selain pasrah, mereka tetap berjuang untuk keluar seraya menanti uluran tangan agar dapat menjalani kehidupan secara normal. Ibarat kehidupan yang hanya dihadapkan pada sebuah keniscayaan, bahwasannya dari masyarakat yang mencoba menegasi kelompok sosial lain yang dipandang sebagai *victim* (korban) dari keangkuhan dan kecongkakan sebagian individu. Korban dari pandangan hidup yang

berlandaskan struktur kesadaran manusia sebagai pemegang otoritas tunggal. Sebuah klaim kesadaran yang semena – mena. Singkat kata, bicara tentang prostitusi adalah bicara tentang peradaban itu sendiri yang usianya hampir sama tuanya dengan usia kehidupan manusia.

Merebaknya praktek pelacuran merupakan gejala gagalnya sistem masyarakat kita mengantisipasi semakin kuatnya pengaruh kehidupan keduniawian. Praktek pelacuran yang sudah merebak tidak hanya di kota – kota besar tetapi sudah merambah masuk ke pelosok – pelosok pedesaan. Mereka beroperasi baik secara terselubung maupun terang – terangan. Menjamurnya praktek prostitusi ini tidak berdiri sendiri, baik perempuan maupun laki – laki yang terjun ke dunia pelacuran sesungguhnya telah membiarkan dirinya terperangkap oleh situasi dan ilusi yang memaksa dirinya harus menjalani kehidupan seperti itu.

Tentunya adalah sebuah pilihan dalam hidup, untuk memutuskan menyandang sebuah status mantan pelacur tidak ubahnya dengan profesi lainnya, sebagai seorang mantan pelacur akan dapat menggambarkan bahwasannya individu ini berhak atas segala kehidupan yang dirasa akan menjadi lebih baik jika saja ia mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki segala kekeliruan yang sudah dengan sadar ia lakukan. Sebuah konsekuensi yang apapun itu harus mereka jalani, tentang perbuatan dan pemikiran yang mereka sadar hal ini harus segera diakhiri.

Mantan pelacur yang ingin kembali dalam lingkup keluarga dan ingin hidup bersama dengan masyarakat umum, di sisi lain, mantan pelacur ini merasa kesulitan untuk merubah sikap dan pandangan masyarakat yang telah memberikan predikat buruk serta dipandang sebagai makhluk yang menyandang stereotip dan dianggap tidak pantas menjadi bagian dari masyarakat yang memandang bahwa mantan pelacur ini telah melakukan penyimpangan yang menyimpang dari tendensi sentral.

Kondisi yang demikian ini mengakibatkan kehidupan sosial mantan pelacur kurang stabil, banyak memendam konflik internal (konflik batin) dan konflik dengan lingkungannya. Akibatnya, mantan pelacur ini dalam kelanjutan hidupnya menemui kesulitan untuk menata kembali dirinya sendiri, berusaha semampunya untuk bisa bertahan hidup tanpa ada niat sedikitpun untuk menoleh ke belakang dalam keadaan yang sebenarnya, serta berusaha menghapus lebel negatif tentang dirinya yang tentang masa lalunya dan tentang kedudukan sosialnya terhadap masyarakat luas.

Mekanisme seperti ini disebut kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Dalam kenyataannya, mantan pelacur mengalami kekerasan simbolik. Sebutan, predikat, stereotype, jargon, moto, semboyan, olok-olok, plesetan, dan kekerasan simbolik lainnya menjadi bagian dari kehidupan mantan pelacur. Kekerasan simbolik bekerja dengan menyembunyikan pemaksaan dominasi untuk menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian” (Fashri, 2007:20). Inilah yang kemudian membuat mantan pelacur yang terdominasi menjadi tidak keberatan atau ikhlas untuk dikuasai dan berada dalam lingkaran dominasi.

Dalam bersosialisasi antara pelacur dengan masyarakat akan banyak hal yang didapat oleh pelacur seperti, cara pandang masyarakat setempat terhadap mereka, pandangan masyarakat yang menganggap rendah dan memojokkan mantan pelacur dalam kehidupan sehari-hari. Adanya anggapan, bahwa apabila bersosialisasi dengan seorang mantan pelacur dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Fakta dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak mau bergaul dan menganggap rendah pekerjaan pelacur, khususnya para istri. Para istri merasa tidak senang dengan mantan pelacur, sebab pelacur dianggap sebagai peretak rumah tangga (*Survey pada tanggal 13 September 2014*).

Stigma masyarakat seperti inilah yang dirasa sangat mengganggu hubungan sosial para mantan pelacur dalam menjalin sosialisasi terhadap keluarga dan masyarakat di relokasi. Dalam kehidupan sehari – hari sering

terdengar perkataan yang bersifat merendahkan dari masyarakat misalnya: dasar wanita sundal, perek, dan sebagainya. Sehingga muncullah berbagai perlawanan yang dilakukan oleh mantan pelacur terhadap stigma masyarakat yang beredar di relokasi. Permasalahan seperti ini terkadang sulit bagi para mantan pelacur untuk menjadi salah satu bagian masyarakat normal pada umumnya, dan membentuk identitas yang baru di tengah masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, mengambil permasalahan tentang bagaimana resistensi mantan pelacur dalam melawan stigma perek masyarakat di lingkungan relokasi pasca penutupan lokalisasi Dupak-Bangunsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resistensi mantan pelacur dalam melawan stigma perek masyarakat yang beredar di relokasi pasca penutupan lokalisasi Dupak-Bangunsari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai wacana bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial khususnya dalam bidang sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi individu dapat lebih memahami bagaimana mengupayakan diri sendiri sebagai individu agar menjadi lebih berharga dalam

kehidupan lingkungan sosial baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat.

- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan sehingga memahami mantan pelacur yang ingin kembali dalam kehidupan sosialnya di tengah masyarakat sebagai suatu upaya untuk bersosialisasi serta dapat merubah sikap dan pandangan negatif pada mantan pelacur dan diharapkan dapat memberikan bantuan pada mantan pelacur untuk menghadapi stigma masyarakat di relokasi pasca penutupan lokalisasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azifatul Fafida, mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010 dengan judul “*Mantan Pelacur (Studi Tentang Persepsi Mantan Pelacur Berkaitan Dengan Pandangan Masyarakat Di Surabaya)*”. Dalam penelitian ini, memberikan sebuah penjelasan mengenai keberadaan mantan pelacur di Surabaya. Sebuah fenomena yang kerap tersembunyi dari pandangan publik di setiap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berhasil mengungkapkan bagaimana seorang mantan pelacur menanggapi pandangan masyarakat tentang keberadaan mereka. Usaha mantan pelacur dalam menghapus pandangan negatif tentang masa lalu mereka di hadapan publik adalah dengan berperan serta dalam setiap kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya, tinggal di lingkungan baru yang lebih baik dengan serangkaian norma di dalamnya yang harus dipatuhi bersama, ikut dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan rohani serta bimbingan mental, menghindari bergaul kembali dengan teman-teman seprofesinya dahulu agar tidak terpengaruh ajakan untuk kembali dunia prostitusi, selalu berpikiran positif dalam menghadapi hidup bahwa dengan

usaha manusia tetap bisa hidup, menikah dengan laki – laki yang baik agar dapat membimbing mereka dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musahwi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 2014 dengan judul “*Di Balik Pelarangan Negara Terhadap Prostitusi (Studi Tentang Politik Kepentingan dalam Wacana Amoralitas Prostitusi dan Perlawanan Kaum Prostitusi di Parangtritis)*”. Dalam penelitian ini bertumpu pada nilai dan relasi social-budaya, ekonomi, gender, dan politik dalam wacana amoralitas seksual dan pelarangan prostitusi yang dihubungkan dengan konteks historis subjek yang diteliti.

Hasil penelitian ini, *Pertama*, *hidden interest* dalam pelarangan prostitusi adalah menguasai permukiman warga yang berstatus tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) untuk membangun mega proyek wisata Parangtritis. Pemerintah mendesain wacana amoralitas seksual dalam prostitusi Parangtritis dan kemudian melahirkan hukum pelarangan prostitusi. Produk hukum itu digunakan untuk menggusur permukiman yang dianggap sebagai praktik prostitusi. *Kedua*, pelarangan prostitusi tersebut memicu kesadaran kolektif dari warga dan PSK untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Bantul yang didukung oleh beberapa kalangan LSM dan mahasiswa. Perlawanan itu antara lain: (1) menuntut pencabutan peraturan daerah pelarangan prostitusi, (2) aksi – aksi simbolik untuk menyadarkan masyarakat tentang tindakan aparatus kekuasaan yang diskriminatif terhadap mereka, (3) pembangkangan diam – diam terhadap peraturan daerah pelarangan prostitusi yang dilakukan secara terorganisir oleh pelaku prostitusi untuk mengelabui aparat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azifatul Fafida dengan judul “*Mantan Pelacur (Studi Tentang Persepsi Mantan Pelacur Berkaitan Dengan Pandangan Masyarakat Di Surabaya)*” dengan penelitian ini yaitu, dilihat dari segi lokasi penelitianpun sudah berbeda, Azifatul Fafida memilih lokasi Kota Surabaya yang mendefinisikan secara luas tentang gambaran usaha mantan

pelacur menghapus stigma serta pandangan buruk masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Sedangkan dalam penelitian ini, menjelaskan tentang resistensi mantan pelacur terhadap stigma masyarakat di sekitar relokasi pasca penutupan lokalisasi. Bagaimana perlawanan mantan pelacur terhadap stigma buruk masyarakat terhadap dirinya. Penelitian ini lebih spesifik dalam suatu daerah dimana mantan pelacur masih bertempat tinggal di lokalisasi dan berbaur dengan masyarakat sekitar namun, tidak lagi beraktivitas sebagai pelacur.

Perbedaan penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Musahwi ialah yang pertama, perbedaan lokasi antara Daerah Bangunsari Kota Surabaya dengan Daerah Pesisir Laut Kidul, Parangtritis Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perbedaan sebagai berikut: dalam tesis saudara Musahwi ialah lebih kepada nilai dan relasi sosial-budaya, ekonomi, gender, politik dalam wacana amoralitas seksual dan pelarangan prostitusi yang dihubungkan dengan konteks historis subjek.

Perlawanan di sini dilakukan oleh pelacur dan masyarakat yang telah menyadari kondisi dirinya sebagai korban dari politik kekuasaan, yang bertujuan untuk melakukan penolakan serta perlawanan terhadap aparatus pemerintahan Kabupaten Bantul. Penolakan dan perlawanan yang dilakukan berupa aksi – aksi yang tersusun dari berbagai status dan kalangan. Misalnya sampai penelitian Musahwi ditulis, mereka tetap konsisten melakukan aksi massa saat malam jum'at, Selasa Kliwon, dan malam satu suro. Pada tahun 2011 silam, tepatnya pada tanggal 5 Februari, warga dan pelaku prostitusi melakukan aksi ritual labuhan di pantai. Selain orasi penolakan dan juga pembacaan doa – doa lewat tembang tradisional, warga dan kaum prostitusi juga melakukan perlawanan simbolik dengan membuang gambar bupati Bantul Idham Samawi periode 2004-2009 dan Bupati Sri Surya Widati periode 2009-2014 ke dalam laut sebagai simbol membuang bala yang kini dialami warga Parangtritis.

Sedangkan dalam penelitian ini, perbedaannya ada pada subjek yang diteliti. Perlawanan yang dilakukan oleh mantan pelacur terhadap stigma perek

masyarakat di relokasi bukan perlawanan warga dan kaum prostitusi terhadap pelarangan prostitusi. Penelitian ini lebih kepada perlawanan yang tertutup/sembunyi – sembunyi yang tidak berbentuk aksi, orasi, maupun perlawanan simbolik kepada aparatus pemerintah.

Untuk itu, penelitian yang akurat dan ilmiah akan membantu memberikan solusi tentang bagaimana mantan pelacur menghadapi stigma perek dari masyarakat relokasi pasca penutupan lokalisasi di Daerah Bangunsari, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan.

1.5.2. Penjelasan Konseptual

1.5.2.1. Pengertian *Perek*

Perek adalah seperti halnya dengan pelacur, hanya saja *perek* merupakan akronim dari ‘perempuan eksperimen’ tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sekitar 30 buah kata yang berhubungan dengan persamaan pelacur termasuk *perek* (Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia). Berturut-turut adalah sebagai berikut: ayam kampung (ki); balon; bondon; bunga latar; bunga raya; cabo; gigolo; gongli; hostes; jobong; kembang latar (ki); kupu-kupu malam; lanji; loktong; lonte; lucah; moler; nyamikan (ki); pandiang; pekcun; pemijat; pendayang; penghibur; *perek*; pinang muda; pramunikmat; pramuria; sundal; tunasusila.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan satu persatu persamaan tentang pelacur, sebagai berikut: ayam kampung adalah gadis desa yang dijadikan pelacur, tepat dibawah ayam kampung juga ada ayam kampus yaitu mahasiswi yang merangkap sebagai pelacur (KBBI, 2008:105); balon adalah jawanya pelacur (KBBI, 2008:127). Lema bondon tidak ditemukan dalam KBBI. Bunga latar dan bunga raya sama-sama turunan dari lema bunga, keduanya bermakna pelacur (KBBI, 2008:223); cabo berasal dari Jakarta yang artinya perempuan lacur, pelacur, sundal (KBBI, 2008:231); gigolo mempunyai dua arti, 1) laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih 2) laki-laki

sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa (KBBI, 2008:451); gongli adalah gadis yang melacurkan dirinya untuk kesenangan semata-mata tanpa memerlukan uang bayaran (KBBI, 2008:458); hostes adalah wanita yang pekerjaannya menerima, menjamu, dan menghibur tamu di hotel, klab malam, bar, dsb (KBBI, 2008:507); jobong adalah bahasa yang berasal dari yaitu wanita piaraan (KBBI, 2008:586); kembang latar adalah pelacur (KBBI, 2008:662); kupu-kupu malam sama halnya dengan pelacur (KBBI, 2008:760); lanji (ark pelacur) (KBBI, 2008:786) merupakan kependekatan arkais yang berarti sudah jarang digunakan oleh penutur Bahasa Indonesia; loki dalam bahasa Cina yaitu perempuan pelacur; loktong dirujuk kembali ke loki (KBBI, 2008:839); lonte ialah bahsa kasar dari perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur, sundal, jobang, cabo, mucu (KBBI, 2008:842); lucuh adalah bahasa yang hina sekali, tidak sopan, tidak senonoh, cabul (KBBI, 2008:844); moler yaitu sundal, pelacur (KBBI, 2008:926); nyamikan ialah wanita untuk pelepas hawa nafsu, pelacur (KBBI, 2008:971); pemijat, pendayang, penghibur sudah jamak diketahui maknanya oleh penutur bahasa Indonesia; pramunimat ialah pelayan yang memberikan kenikmatan, pramuria adalah karyawati klab malam yang bertugas melayani dan menemani tamu, hostes (KBBI, 2008:1098); sundal ialah perempuan yang mempunyai kelakuan buruk, lacur, jalang yaitu perempuan jalang setara pelacur (KBBI, 2008:1355); tunasusila adalah perempuan yang tidak mempunyai susila, lonte, pelacur (KBBI, 2008:1502).

Pada penelitian ini yang diangkat sebagai judul ialah *perek* yang sudah dijelaskan pada awal paragraph yaitu ‘perempuan eksperimen’ (Muntijo, 2011).

1.5.3. Teori Resistensi (Perlawanan)

Perlawanan adalah perbuatan cara melawan, perjuangan, usaha mencegah (menangkis, bertahan, dsb); dia berusaha mengadakan-dengan gigih (Ali, Lukman, 1991:579). Sementara itu, Scott (1993:302) menjelaskan perlawanan (resistensi) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah (semua) tindakan

oleh (para) kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan – tuntutan (misalnya; sewa, pajak, kerja paksa, penghormatan) yang dikenakan pada kelas – kelas yang lebih atas (misalnya; tuan tanah, Negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengadukan tuntutan – tuntutan sendiri (misalnya; pekerjaan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas – kelas ini. Perlawanan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan kontradiktif yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Scott (1993:271) dalam penelitiannya, apa yang disebut sebagai ‘kepasrahan kaum tani’ bukanlah benar – benar kepasrahan, melainkan aksi – aksi perlawanan anonym dalam diam yang berlangsung saban harinya, yang bahkan telah menjadi suatu subkultur. Dari Scott lah kita mendapat analisa yang jenius tentang apa yang disebutnya ‘bentuk – bentuk perjuangan kelas gaya *Brechtian*’ (*Brechtian modes of resistance*), yakni “senjata – senjata biasa yang dimiliki kelompok – kelompok yang relative tanpa kekuatan: menghambat, berpura-pura, pura – pura menurut, mencopet, pura – pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya”.

Suatu perlawanan dapat dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Perlawanan terbuka dapat dicontohkan dengan suatu aksi protes bersama yang mungkin dalam bentuk demonstrasi besar – besaran sebagaimana terjadi pada demonstrasi mahasiswa Indonesia pada 1999 untuk menjatuhkan Soeharto. Sementara itu, perlawanan diam – diam atau sembunyi – sembunyi misalnya sebagaimana dijelaskan mengenai perlawanan kaum tani (dalam Scott, 1993:322) menyatakan bahwa tak diharuskan bahwa perlawanan harus mengambil bentuk aksi bersama, apalagi protes terbuka lebih lanjut, menyatakan bahwa berbagai senjata yang digunakan dalam perlawanan secara sembunyi – sembunyi oleh kelompok maupun individu yang relative tak berdaya yaitu bekerja seenaknya, mengelabui, taat dibuat-buat, mencuri kecil – kecilan, pura – pura bodoh, memfitnah, membakar rumah, menyabot, dan seterusnya.

Berdasarkan pernyataan Scott di atas, perlawanan tersembunyi merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan secara tidak terbuka, atau dengan kata lain, perlawanan tersebut dilakukan dengan cara diam – diam. Aksi – aksi perlawanan tersebut dilakukan dibelakang pihak yang dilawan, atau aksi dilakukan dengan sembunyi – sembunyi, dan biasayang dilakukan oleh kelompok yang relative tidak berdaya jika dibandingkan dengan pihak lawannya.

Bloch dalam Scott, (1993:323) menyatakan sebagai berikut:

“Hampir selalu ditakdirkan kalah dan dibasmi, pemberontakan besar terlalu kacau untuk bisa mencapai hasil – hasil yang berarti. Perlawanan yang sabar dan diam – diam seperti yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan selama bertahun – tahun mencapai hasil yang lebih banyak dari pada gemuruh letupan senjata.”

Menurut Bloch (dalam Scott, 1993:325) cara – cara perjuangan demikian cenderung “lebih banyak hasilnya” dalam mengalahkan klaim atas harta benda dan pendapatan kaum tani disbanding dengan bentuk – bentuk gerakan protes atau gerakan sosial terbuka.

Dengan mengikuti Bloch (dalam scott, 1993:323) menyatakan bahwa jika perjuangan diam – diam untuk mengurangi eksploitasi merupakan inti dari perlawanan rakyat di sebagian besar sejarah tani, maka sekian model atau tipologi dari pertentangan sosial mungkin harus merenungkan kenyataan itu. Dan memang benar bahwa sejarah sosial mutakhir telah menunjukkan minat yang jauh lebih besar kepada bentuk – bentuk perlawanan yang tidak ditandai oleh huru-hara atau pemberontakan. Menurut Scott (1993:235) bentuk perlawanan ini bersifat impresif, jangka ketahanan puluhan atau ratusan tahun, jumlah orang yang terlibat selama jangka waktu itu juga jauh melampaui jumlah mereka yang terlibat dalam gerakan sosial tertentu.

Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott (1993:105) mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat:

- 1) Organik, sistematis dan kooperatif.
- 2) Berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri.
- 3) Berkonsekuensi revolusioner.
- 4) Mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi.

Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain- lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak kelas – kelas atas.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:

- 1) Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual.
- 2) Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri.
- 3) Tidak berkonsekuensi revolusioner.
- 4) Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.

Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil- kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi (Scott, 2000:40).

Begitu juga dengan perlawanan yang digunakan oleh mantan pelacur terhadap stigma perek dari masyarakat Bangunsari, mereka membentuk suatu perlawanan dengan diam, tanpa melakukan aksi maupun pemberontakan. Sudah jelas bahwa bentuk perlawanan seperti itu dikatakan sebagai bentuk perlawanan secara sembunyi – sembunyi.

Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah system dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini (Scott, 1993:321). Percobaan-

percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi – negosiasi tentang batas – batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem.

Scott (2000:321) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana – sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi (Scott, 2000:321).

Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi – aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan subkultur – subkultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat aksi-aksi huru-hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisir, dan kekerasan terbuka. Perlawanan ini akan terus berlangsung selama struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 2000:23).

Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka selalu mengalami perubahan (Kusuma dan Agustina, ed., 2003). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh isu yang diangkat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Soekanto (Kusuma dan Fitria, ed., 2003) berpendapat bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi-kondisi sosial dan ekonomi telah menimbulkan tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan berbeda dari sebelumnya. Kemudian Soekanto menambahkan, tuntutan tersebut disebabkan

oleh masalah- masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap yang merupakan sumber frustrasi bagi pemicu timbulnya perlawanan.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, pedagang, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur idiologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal.

Gurr dalam Mas'oed (1998) menyatakan, bahwa adanya empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok- kelompok dominan.

Berkaitan dengan cara – cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

- 1) Perlawanan yang diungkapkan secara individual.
- 2) Perlawanan yang dilakukan melalui tindakan – tindakan kolektif atau bersama.

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara, mulai dari aksi protes terbuka, yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara – cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival.

Sangaji (2000) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio-kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan – alasan yang bersifat sosial- ekonomi, biasanya

diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut. Menurut A.S. Hikam (Prisma, 1990), terjadinya perlawanan terhadap kekuasaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, fenomena perlawanan dari sudut pandang otoritas moral sebagai basis hubungan- hubungan sosial dan stabilitas sosial. Pandangan ini berargumen, bahwa terjadinya gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan merupakan suatu bentuk keberangan moral.

Kedua, perlawanan terjadi karena adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan dan perilaku – perilaku individu. Menurut Hikam (Prisma, 1990), pandangan ini berpendapat bahwa perlawanan terhadap kekuasaan terjadi karena adanya dukungan kolektif, bukan muncul dari kehendak individu. Konflik yang timbul dari fenomena kekuasaan yang mendominasi masyarakat, ternyata telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang di dominasi. Konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik akan menimbulkan kerusakan sosial di masyarakat (Prisma, 1990). Oleh karena itu, konflik perlu diselesaikan dengan baik, yang dikenal dengan resolusi konflik (*conflict resolution*). Tetapi pada penelitian ini, perlawanan sembunyi – sembunyi dilakukan oleh mantan pelacur atas dasar dirinya ingin diakui oleh masyarakat bahwa status pelacur sudah tidak lagi disandang oleh mereka. Sehingga, perlawanan sembunyi – sembunyi dengan bentuk diam dan tidak membalas stigma yang diberikan oleh masyarakat dilakukan oleh mantan pelacur.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini tidaklah mudah mengambil sampel – sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti harus memulai semuanya dari awal hingga dapat menentukan metode penelitian apa yang digunakan, sumber data mana yang diperlukan, teknik penelitian seperti apa yang akan dipakai untuk menganalisis kasus penelitian ini.

Pendekatanpun juga demikian, peneliti ikut berperan serta dalam kehidupan mantan pelacur yang diberi stigma perek oleh masyarakat. Membaur dalam keseharian mantan pelacur menjadi makanan peneliti setiap ada hal yang ingin peneliti dapatkan. Tidak bisa secara langsung tiba – tiba dekat dengan informan tanpa ada pendekatan yang lebih intens yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti.

Kendala yang sulit bagi peneliti ialah ketika tidak diperbolehkannya peneliti masuk ke dalam obyek penelitian dengan alasan Eks PSK tidak sepatasnya mendapat sebutan mantan pelacur seperti apa yang disebut pada subyek penelitian ini, mantan pelacur tidak berhak diekspos lagi karena sudah menemukan kehidupan barunya yang sudah kembali hidup normal dan berbaur dengan masyarakat lagi, mantan pelacur adalah profesi dan cerita lama yang sudah tidak perlu diperpanjang lagi dengan penelitian karena Bangunsari sudah bebas dari kampung prostitusi. Tidak berhenti di sini, peneliti kemudian memberikan pengertian dan penjelasan secara detail untuk bisa tetap melanjutkan observasi serta wawancara mendalam hingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Jika dikatakan harus memenuhi peraturan baik yang ditetapkan Bankesbangpol Provinsi Jawa Timur, Bankesbangpol dan Linmas Kota Surabaya, Kecamatan Krembangan, Kelurahan Dupak memang sudah dipenuhi oleh peneliti tetapi, pada keadaan tertentu peneliti juga harus memenuhi saran yang telah diusulkan oleh beberapa pihak yang statusnya sangat berperan dalam pengasuhan mantan pelacur contohnya; ketika terjun di lapangan serta membaur dengan mantan pelacur juga masyarakat setempat dan itu bertepatan dengan kumpulan PKK maka, yang harus dilakukan peneliti adalah berperan sebagai utusan dari kecamatan yang akan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan, tidak memperlihatkan bahwa peneliti adalah orang yang akan mengorek kehidupan mantan pelacur secara mendalam.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini menggunakan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti berusaha memahami serta menjelaskan suatu peristiwa yang menghubungkan/ada kaitannya dengan orang – orang yang berada dalam situasi – situasi tertentu tanpa adanya intervensi (campur tangan) dari pihak luar.

Menurut Robert Yin (1996) dalam Bugin (2003:20) menyebutkan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batasan – batasan antara fenomena tidak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Selain itu, jenis pendekatan pendekatan studi kasus ini lebih banyak berfokus pada atau berupaya menjawab pertanyaan – pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah) dalam kegiatan penelitian.

1.6.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah mantan pelacur. Sebagai responden, subyek penelitian hanya akan memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, sedangkan sebagai informan, yang bersangkutan mampu memberikan informasi tentang dirinya juga tentang orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snow ball sampling* adalah untuk memperkuat kualitas data, dimana informasi yang

diterima dari para informan yang telah ditentukan ditambah dengan informan yang direkomendasikan oleh informan tersebut. Hal ini dengan pertimbangan bahwasanya sulitnya mencari informan yang dengan bersedia terbuka memberikan kesaksiannya. Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut:

1. **Pertama,** merujuk pada permasalahan yang diajukan yakni perlawanan mantan pelacur maka, pemilihan subyek penelitian yang dilakukan ialah mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - Mantan pelacur yang sudah berkeluarga dan menempati relokasi di Dupak Bangunsari. Mengapa harus yang sudah berkeluarga? Karena mantan pelacur yang sudah berkeluarga menjalani proses penerimaan yang lebih lama baik oleh pasangan, keluarga maupun oleh masyarakat Bangunsari.
 - Mantan pelacur yang berhenti dari profesi selama 3 tahun, dengan alasan pasca penutupan lokalisasi 2012 silam hingga penelitian ini dilakukan adalah merupakan reaksi atau bentuk perlawanan awal sampai pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya sebagai batasan penelitian ini.
2. **Kedua,** berangkat dari sebuah kejadian dalam kehidupan sehari-hari mantan pelacur yang hidup berbaur dengan masyarakat Dupak-Bangunsari. Dari situlah muncul stigma dari masyarakat terhadap mantan pelacur. Adapun kriteria yang ditentukan peneliti untuk mendapatkan informan yang menstigma mantan pelacur:
 - Individu adalah penduduk asli yang sudah lama tinggal di Dupak-Bangunsari.
 - Individu yang mempunyai masalah pribadi dengan mantan pelacur.

1.6.4 Sumber Data

1.6.4.1 Data Primer

Data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Kata-kata dan tindakan informan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Mana di antara ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari situasi satu ke situasi yang lainnya.

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang mantan pelacur yang keberadaannya disinggung-singgung serta dianggap mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat di Daerah Relokasi Bangunsari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan atau *desk study* berasal dari data statistik, peraturan atau kesepakatan-kesepakatan, pedoman atau panduan, laporan-laporan, arsip dan dokumentasi dari berbagai pihak yang relevans. Data dan informasi sekunder digunakan sebagai data pembanding atau pemeriksa (*cross check*) terhadap data primer. Data dan informasi dikumpulkan dari Instansi Pemerintah baik di tingkat nasional, propinsi, Kabupaten maupun masyarakat, seperti Bappeda dan Dinas Sosial dan instansi lainnya yang terkait, Informasi juga dikumpulkan dari laporan-laporan LSM lokal, perguruan tinggi atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan sepanjang pemberian informasi yang sesuai.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti, proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik : observasi (*observation partisipation*), dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

1.6.5.1 Observasi Partisipasi

Suatu observasi disebut observasi pasrtisipan jika orang yang mengadakan observasi (observer) turut ambil bagian dalam perikehidupan observer. Jenis teknik observasi partisipan umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk menyelidiki satuan – satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa karena pengamatan partisipatif memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal – hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti ikut berbaur dalam kehidupan mantan pelacur, baik itu dalam bekerja maupun dalam kegiatan bermasyarakat. Contohnya dalam bekerja, peneliti berperan serta dalam wadah keterampilan *home industry* batik yang di dalamnya beranggotakan mantan pelacur juga beberapa warga setempat; kemudian dalam kegiatan bermasyarakat, misalnya ialah kumpulan PKK dengan ibu – ibu rumah tangga setempat.

Observasi partisipasi ini melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Keuntungan cara ini adalah peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi penelitian. Kelemahannya, yaitu ada kecenderungan peneliti terlampau terlibat dalam situasi itu sehingga prosedur yang berikutnya tidak mudah dicek kebenarannya oleh peneliti lain.

1.6.5.2 Wawancara

Secara definitif Nazir (2005: 193-194) menjelaskan bahwa wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan melalui media atau alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara secara mendalam merupakan metode yang paling utama dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Sebab, dijelaskan bahwa dengan metode inilah (wawancara mendalam) esensi dari fenomena yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya secara langsung). Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok (Sugiyono, 2007).

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) menjadi teknik pengumpulan data primer pertama terhadap informan yang dipilih, melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mantan pelacur dan masyarakat yang berada di lingkungan relokasi Dupak Bangusari. Tetapi, dalam melakukan wawancara secara mendalam ini, di lapangan peneliti lebih menyerupai suatu bentuk dialog antara peneliti dan informan dengan tujuan agar memperoleh data yang lebih mendalam, lebih detail serta dapat dipercaya kebenarannya. Walaupun menggunakan pedoman wawancara, tetapi hanya sebatas digunakan untuk panduan saja, selebihnya adalah pertanyaan peneliti yang sifatnya melebar. Agar tidak terlihat kalau peneliti mengorek tuntas kehidupan informan.

1.6.6 Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data

1.6.6.1 Analisis Data

Menurut Patton, Analisis Data merupakan proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong: 2006: 280).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang menyatakan ada tiga proses analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2006: 287).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada suatu sistem yaitu penyederhanaan dan transformasi data mentah yang muncul dari bahan-bahan tertulis di lapangan maupun hasil-hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Data berupa data sekunder (dari berbagai referensi buku) dan data primer (data wawancara mendalam dari subyek penelitian).

Penyajian data merupakan proses pemaparan informasi yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh dari data yang didapatkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) pada masyarakat yang berada pada lingkungan relokasi di Dupak Bangunsari Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dengan kriteria yang sudah dijelaskan di atas, serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data dan interpretasi peneliti. Data tersebut dipaparkan secara sistematis dan menyeluruh sehingga ditemukan satu titik kesimpulan.

1.6.6.2 Pemeriksaan Keabsahan Data

Selain metode analisis di atas, metode pemeriksaan keabsahan data juga dilakukan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Metode pemeriksaan keabsahan data menurut Creswell

adalah peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi diantaranya pemeriksaan keabsahan data dengan member checking, triangulasi dan auditing.

Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu memanfaatkan hal-hal lain diluar data yang ada untuk keperluan atau pembandingan data yang diperoleh di lapangan. Dimana menurut Denzin terdapat empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori (Moleong, 2006:127).

Dari beberapa macam triangulasi di atas, peneliti mengambil jenis triangulasi sumber yang lebih sesuai dengan kemampuan peneliti. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data, yakni dengan membandingkan antara data dari hasil wawancara mendalam dilakukan peneliti terhadap mantan pelacur dan masyarakat yang menempati daerah sekitar relokasi yang telah ditentukan kriterianya, serta membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Sehingga, triangulasi dikenal dengan data jenuh, yaitu kapan dan dimanapun ditanyakan kepada informan, dan pada siapapun pertanyaan yang sama diajukan, maka hasil jawaban yang didapat tetap konsisten sama (Denzin, 1978 dalam Idrus, 2007:178).

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Surabaya, tepatnya di daerah Bangunsari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) oleh peneliti dengan maksud dan tujuan serta berbagai pertimbangan – pertimbangan yaitu, daerah lokalisasi yang sudah ditutup pada tahun 2012 silam dengan predikat berhasil mementaskan pelacuran tetapi dengan menyimpan masalah yang belum sempat terjamah oleh peneliti lain. Sehingga,

peneliti tertarik dengan lokasi penelitian dan kemudian memilih Bangunsari sebagai tempat penelitian.

Sedangkan jadwal dari penelitian ini dijelaskan dengan tabel berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Persiapan pengumpulan data lapangan						
2.	Penyusunan proposal Penelitian						
3.	Bimbingan Proposal pada Dosen Pembimbing						
4.	Seminar Proposal						
5.	Penyusunan Skripsi						
6.	Bimbingan Skripsi						
7.	Sidang Skripsi						
8.	Revisi Skripsi						
9.	Penggandaan/pengumpulan Skripsi						